PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR BANTARAN SUNGAI DI PROVINSI JAWA BARAT

Agus Setiaman, dan Teddy Kurnia Wirakusumah
Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
E-mail : agus.setiaman@unpad.ac.id; teddy@unpad.ac.id

ABSTRAK. Urusan pembangunan bukan saja berhubungan dengan masalah produksi, serta distribusi barang material namun juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya sebagai subjek pembangunan dan tidak sekadar sebagai objek pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia, sehingga dihasilkan manusia-manusia yang kreatif dalam berbagai aspek seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, dan budaya, bukan hanya kreatif dalam aspek ekonomi saja. Dalam prakteknya proses pembangunan hendaknya menempatkan masyarakat sebagai mitra relasi yang sejajar, masyarakat ditempatkan sebagai asset yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Perkembangan tentang konsep pembangunan dewasa ini adalah pembangunan *partisipatoris* dalam arti pembangunan yang mengajak rakyat terkait untuk mengatur diri sendiri, setiap golongan dalam masyarakat merupakan kekuatan-kekuatan potensial dalam mengaktualisasikan pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial. Masyarakat sekitar bantaran sungai perlu di ajak dan berperan serta dalam proses pembangunan yang ditetapkan. Warga sekitar bantaran tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan yang dijalankan tapi ikut berperan dan terlibat aktif dalam setiap penerapan kebijakan pembangunan bantaran sungai di wilayah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Pembangunan; partisipasi; masyarakat; aktif; Provinsi Jawa Barat

COMMUNITY EMPOWERMENT AROUND RIVERBANKS IN WEST JAVA PROVINCE

ABSTRACT. *Development is not merely a matter of the production and distribution of material goods; it must also create conditions that enable individuals to cultivate their creativity as active subjects of development rather than passive objects. Ultimately, development must focus on human resource development, fostering individuals who are creative across psychological, sociological, political, anthropological, and cultural dimensions—not solely in economic terms. In practice, the development process should position the community as an equal partner, viewing the people as assets with the potential to become agents of development themselves. Contemporary development concepts emphasize participatory development an approach that empowers the relevant population to manage their own affairs recognizing that every segment of society represents a potential force for realizing economic and social development. Communities living along riverbanks need to be engaged and encouraged to participate in the established development processes. Residents of these areas should not merely be spectators; they must play an active role in the implementation of policies regarding riverbank development, particularly within West Java Province.*

Keywords*: Development; participation; community; active; West Java Province.*

PENDAHULUAN

Secara geografis wilayah Jawa Barat sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan dataran tinggi, sehingga banyak memiliki sungai baik sungai besar yang melintasi beberapa wilayah kabupaten bahkan melintasi provinsi, dan tidak sedikit pula warga masyarakat yang hidup dan menghidupi dirinya tergantung pada sungai yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa sungai yang terkenal di Jawa Barat antara lain sungai Citarum, Sungai Citanduy, Sungai Ciseel, Sungai Citarik, Sungai Ciliwung, Sungai Cimandiri, dan lain sebagainya.

Sungai telah menjadi bagian essensial bagi warga tanah Pasundan hal ini bisa terlihat dari penamaan sungai yang diawali dengan kata *"ci"* dari kata *"cai"* berarti air yang merupakan sumber kehidupan. Seluruh kawasan sungai di Jawa Barat sesungguhnya memiliki potensi luar biasa baik ekosisten lingkungan maupun potensi pengembangan wisata air bahkan pengembangan sosial budaya yang menarik.

Sungai merupakan sumber peng-hidupan masyarakat baik masa lalu maupuan masa yang akan datang. Karena itulah tidak terlalu mengherankan kalau dalam budaya masyarakat Sunda tanah yang mereka tempati, lahan yang mereka tumpangi disebut dengan *"lemah cai"*

Pertumbuhan dan laju pembangunan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada tingginya alih fungsi

sungai dan kawasan sekitar sungai yang semula merupakan kawasan konservasi atau bantaran berubah menjadi kawasan pemu-kiman dan aktifitas ekonomi yang lain. Dan lebih parahnya lagi sekian tahun proses alih fungsi seolah dibiarkan terkesan di maklumi atau bahkan seolah mendapat "restu". Pemukiman di sekitar bantaran sungai semakin padat, sungai berubah menjadi semacam tempat pembuangan sampah akhir, air sungai berubah menjadi hitam bahkan bau tidak alang kepalang.

Warga sekitar sungai sepertinya tidak lagi menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan, tidak lagi menganggap bahwa sungai memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung untuk kehidupannya. Disisi lain warga mulai merasa dan mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih, saat musim penghujan air sungai meluap ke pemukiman, sungai tidak lagi mampu menampung debit air yang melipah, bencana banjir melanda di kawasan bantaran sungai dan warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan ikan di sungai yang ada disekitarnya.

Keprihatinan yang mulai tumbuh dan berkembang serta kesadaran pentingnya fungsi sungai merupakan salah satu syarat penting dalam proses penataan kawasan bantaran sungai dengan melibatkan peran seluruh kelompok kepentingan kawasan bantaran sungai mulai dari pemerintah pusat, daerah, warga masyarakat sekitar sungai, para tokoh masyarakat, aparat keamanan, para pemuda, para pendidik, tokoh agama. Pelibatan stakeholder mulai dari tahap perencanaan hingga operasional dan eva-luasi. Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan kawasan sungai sehingga pemberdayaan mutlak diperlukan dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi hal utama.

1. Konsepsi tentang Pembangunan

Sesuai dengan paradigma kebijakan pembangunan desentralisasi dimana pembangunan itu subjek dan pemilik pembangunan tidak lain adalah rakyat sendiri. Dalam paradigma pembangunan seperti ini kapasitas rakyat yang mandiri, serta kemampuan dalam melakukan kontrol internal atas sumberdaya yang bersifat materi dan non materi. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat menghendaki tumbuh kembang pemberdayaan dimana daya kreasi, kreatifitas merupakan modal utama untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini pemerintah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelaksana pembangunan melainkan sebagai penyelenggara pelayanan *social (social services provider)* pemerintah menematkan diri sebagai perantara, menjadi fasilitator, melakukan koordinasi, memberikan pembelajaran serta peran lain yang bersifat layanan kepada warganya. Pola pembangunan yang menekankan inisiatif pembangunan berasal dari masyarakat *(bottom-up)*, yang menekankan pembangunan berdasar kebutuhan nyata warga masyarakat, yang mengetahui kebutuhan dan harapan yang diinginkan adalah warga masyarakat sendiri. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan dari, oleh dan untuk warga masyarakat sendiri.

Berdasar paradigma pola pembangunan yang bersifat *bottom-up* dimana pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk maka kunci pembangunan ada pada pemberdayaan karena merumuskan, menetapkan dan melaksanakan serta memelihara hasil pembangunan tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teori-teori pembangun-an yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kini mulai bergeser pada pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Korten* dan *Carner* dalam Hary Hikmat (2001:94) menyatakan secara sederhana bahwa pembangunan yang berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a) Menekankan sector industry bukan sector pertanian padahal negara-negara berkembangan sebagian besar bermatapencaharian di sector pertanian.
(b) Pembangunan berpusat di kota bukan desa
(c) Kepemilikan pada aset produksi oleh pihak tertentu bukan pada banyak pihak.
(d) Investasi pembangunan menguntungkan kelompok terbatas, tidak untuk setiap kelompok.
(e) Menekankan pada optimalisasi penggunaan modal tidak pada optimalisasi sumberdaya manusia.
(f) Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara besar-besaran dan seringkali merusak lingkungan bahkan menghancukan sumber daya hayati yang lain. Eksploitasi sumberdaya alam ini digunakan unuk jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
(g) Menekankan pada perusahaan skala besar, perusahaan nasional, bahkan transnasional yang menghasilkan perekonomian global, akan tetapi kurang adaptif dan rawan gangguan goncangan ekonomi glbal.

Pola pembangunan yang berorientasi pada masyarakat maka titik tekan ada pada

pemberdayaan dimana pengalaman nyata masyarakat dalam melakasanakan pembangunan merupakan modal pembangunan itu sendiri. Dengan daya inisiatif, dan daya kreasi serta daya imajinasinya warga masyarakat menempatkan diri sebagai sumber daya pembangunan, pembangunan materi bukan pusat dari semua pembangunan yang dilaksanakan akan tetapi pembangunan spiritual juga menjadi pusat perhatian dalam membangun masyarakat, dengan demikian pembangunan menghendaki keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan spiritual.

Berhubungan dengan hal tersebut *Karten* dan *Carner* mengemukakan tiga tema penting dalam pembangunan yang berorientasi pada rakyat antar lain:

1. Menekankan pada usaha mandiri golongan miskin untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Pada kelompok rumah tangga miskin maka sector tradisional adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara konvensional,
3. Munculnya kesadaran pentingnya lembaga yang bisa membantu meningkatkan keterampilan bagi para penerima bantuan kelompok miskin agar dapat mandiri dan mampu mengelola sumber daya lokal.

2. Karakteristik Masyarakat Bantaran Sungai

Karakteristik masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai di Jawa Barat (seperti di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum, Ciliwung, Cikapundung, Cimanuk, Ciseel, Cikamojang dll) merepresentasikan fenomena sosio-ekologis yang kompleks. Pembentukan permukiman ini umumnya dipicu oleh urbanisasi, keterbatasan lahan perkotaan, dan tingginya nilai properti, yang kemudian membentuk pola hidup dan struktur sosial yang khas.

Secara komprehensif, karakteristik masyarakat bantaran sungai di Jawa Barat dapat dibedah m elalui beberapa dimensi utama:

a. Profil Sosial-Ekonomi dan Kerentanan

Masyarakat bantaran sungai mayoritas merupakan kelompok pekerja di sektor informal. Mata pencaharian mereka sangat beragam, mulai dari pedagang keliling, buruh harian lepas, hingga pengepul barang bekas.

1) **Siklus Pendapatan:** Rata-rata pendapatan bersifat harian dan fluktuatif, membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
2) **Kepadatan Hunian:** Kondisi perekonomian memaksa efisiensi ruang yang ekstrem. Sering dijumpai hunian semi-permanen seluas kurang dari 30meter persegi yang ditinggali oleh 4 hingga 8 orang, bahkan mencakup lebih dari satu Kepala Keluarga (KK).
3) **Sasaran Kebijakan Sosial:** Karena profil ekonomi ini, komunitas bantaran sungai sering menjadi lokus utama dari berbagai intervensi perlindungan dan jaminan sosial (seperti Program Keluarga Harapan/PKH). Tantangan terbesar dalam ekosistem ini bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan bagaimana intervensi tersebut dapat menstimulasi pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian secara ekonomi, sosial, dan psikologis, guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

b. Kondisi Spasial dan Adaptasi Lingkungan

Pertumbuhan permukiman yang tidak terencana di sepanjang badan sungai melahirkan karakteristik keruangan yang berisiko tinggi.

1) **Krisis Ruang Terbuka:** Tidak ada jarak antar-bangunan. Gang-gang sempit (berukuran 80–100 cm) tidak hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi, tetapi terpaksa dialihfungsikan menjadi ruang sosial, tempat bermain anak, hingga area ekonomi.
2) **Kerentanan Ekologis:** Terdapat eksposur langsung terhadap risiko hidrometeorologi, terutama banjir tahunan. Seringkali fondasi rumah warga secara langsung menjadi tanggul pembatas aliran sungai.
3) **Keterbatasan Infrastruktur Dasar:** Akses terhadap air bersih komersial (PDAM) seringkali membebani secara ekonomi, sehingga ketergantungan pada fasilitas MCK komunal sangat tinggi. Manajemen limbah cair dan padat yang terbatas kerap berujung pada praktik pembuangan langsung ke badan sungai.

c. Modal Sosial dan Dinamika Kelompok

Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman lingkungan yang konstan, masyarakat bantaran sungai mengembangkan mekanisme perta-hanan *(defense mechanism)* yang kuat berbasis kohesi sosial.

1) **Solidaritas Organik:** Kesamaan nasib dan tantangan ruang hidup mendorong terbentuknya ikatan kolektif yang erat. Praktik gotong royong sering kali menjadi instrumen utama, baik dalam

pengelolaan fasilitas komunal darurat maupun saat mitigasi pasca-bencana.

2) **Norma Informal:** Di beberapa daerah, pengelolaan lingkungan sering kali tidak lagi bertumpu pada hukum adat tradisional, melainkan beralih pada kesepakatan-kesepakatan informal yang dipelopori oleh tokoh pemuda atau aparatur kewilayahan setempat.

d. Pola Komunikasi dan Jaringan Interpersonal

Karakteristik tata ruang yang padat sangat memengaruhi bagaimana informasi beredar dan memengaruhi opini publik di komunitas ini.

1) **Dominasi Komunikasi Interpersonal:** Arus informasi primer tidak selalu bertumpu pada media massa. Gang-gang sempit dan MCK komunal berfungsi sebagai "saluran komunikasi" alami tempat pertukaran informasi informal terjadi secara intens.
2) **Peran *Opinion Leader*:** Pengaruh tokoh informal (seperti Ketua RT/RW, tokoh agama, atau sesepuh pendatang) sangat determinan. Efektivitas sebuah program edukasi—baik terkait sanitasi lingkungan, mitigasi bencana, maupun penyuluhan sosial—sangat bergantung pada pelibatan tokoh-tokoh lokal ini sebagai komunikator utama untuk mengubah perilaku kelompok.

Secara keseluruhan, masyarakat bantaran sungai di Jawa Barat bukan sekadar entitas yang menduduki kawasan ilegal atau rawan bencana, melainkan sebuah sistem sosial yang kompleks. Mereka memiliki daya resiliensi tinggi, namun membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang terkalibrasi secara sosiologis dan komunikatif untuk bisa keluar dari kondisi kerentanan spasial dan ekonomi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kajian literatur (*literature review study*) merupakan jenis penelitian ilmiah yang menjadikan publikasi akademis yang ada seperti artikel jurnal, buku, dan laporan riset sebagai data primer. Riset ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat sekitar bantaran sungai di Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Pembangunan Partisipatif

Istilah komunikasi pembangunan partisipatif (atau Kombangpar) merupakan persamaan dengan *Participatory Development Communication* yang telah dikenal sejak tahun 1990-an (Bessette dan Rajasunderam, 1996; Bessette, 2004; 2006). Konsep lain yang mendo-rong munculnya komunikasi pembangunan partisipatif adalah *Participatory Communication* atau *Participatory Communication for Social Change* (Servaes et al., 1996; Servaes, 2002a; Kim, 2005). Rajasunderam (1996) meyakini komunikasi pembangunan partisipatif adalah konsep yang berpotensi mampu mengurangi ketergantungan, mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Lahirnya konsep Komunikasi Pem-bangunan Partisipatif diawali oleh perubahan kebijakan pembangunan, dimana awalnya me-musatkan pada pertumbuhan ekonomi dan sekarang ini pusat pembangunan pada sumber-daya manusia yang awalnya di promosikan PBB dan kini seudah diadopsi secara luas. (Korten & Klauss, 1984; Cernea, 1988).

Menurut Beltran (2004), ada tiga konsepsi yang menonjol jika membicarakan hubungan antara komunikasi (sosial) dengan pembangunan nasional berdasarkan pengalaman-nya di Amerika Latin, yaitu:

a. Komunikasi Pembangunan *(Development Communication)*
   Development communication merupakan komunikasi mengasumsikan media massa dapat mendorong perubahan sosial sebagai upaya mengubah masyarakat tradisional mejadi masyarakat yang melek teknologi dengan berbagai difusi dan inovasinya dimana pertumbuhan ekonomi adalah penyangganya.
b. Komunikasi Penunjang Pembangunan *(Deve-lopment Support Communication)*
   Development Support Communication merupakan pendekatan dirancang dan diorganisir baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pendekatan yang menjadi kunci pencapaian tujuan praktis dari pembangunan yang khusus.
c. "*Alternative Communication for Democratic Development"*
   Komunikasi alternatif untuk pembangunan demokratis didasarkan asumsi bahwa komunikasi yang seimbang (komunikasi melalui media massa dan komunikasi interpersonal) akan meningkatkan akses

informasi baik ke warga masyarakat ataupun dari warga masyarakat sehingga keberlanjutan pembangunan relative lebih terjamin. Disamping peningkatan pembangunan material, keadilan sosial dan kebebasan secara umum. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Beltran (1976) yang sebelumnya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan baru dalam komunikasi berakar pada pemahaman komunikasi secara integral dan dinamis sebagai suatu proses dimana semua komponen harus diperhatikan secara seimbang.

Konsepsi komunikasi alternatif untuk pembangunan demokratis diatas adalah konsepsi yang memberi pengaruh tidak langsung dan sejalan dengan konsepsi Kombangpar. Bessette (2004) mengemukakan komunikasi pembangunan partisipatif adalah kegiatan yang dirancang dengan pendekatan partisipatif dan penggunaan media komunikasi massa serta komunikasi interpersonal yang bertujuan untuk menjembatni dialog antara pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaanya, dengan kata lain komunikasi pembangunan partisipatif merupakan seperangkat aktifitas yang berkontribusi dalam pencarian solusi yang mendapatkan dukungan semua pihak.

Proses partisipasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah partisipasi komunitas dengan pelibatan kelompok yang berbeda-beda dan bersama dengan kelompok kepentingan serta agen pembangunan yang bekerjasama dan melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan pembangunan. Pada umumnya yang dimaksud dengan pemangku atau kelompok kepentingan antara lain komunitas (masyarakat) atau kelompok masyarakat yang aktif, aparat pemerintah baik lokal maupun regional, petugas teknis, LSM atau lembaga lain yang bekerjasama untuk pembangunan yang direncanakan dan hendak dilaksanakan.

Pergeseran peran juga terjadi dalam memaknai komunikasi yang awalnya terfokus pada memberi informasi, mempersuasif warga masyarakat untuk mengubah perilaku atau sikap pendapatnya menjadi fasilitasi kepada para pemangku kepentimgan untuk pemecahan masalah bersama. Dengan demikian paradigma top-down, yang searah cenderung bersifat intruksi, tugas, komando menjadi pendekatan yang bersifat dialog, interaktif dan horizontal. Dimensi komunikasinya berpusat pada receiver (khalayak penerima) daripada kepada sender (sumber). Hal ini bisa terjadi karena yang menjadi awal pembuka proses komunikasinya tidak pada masalah pembangunan melainkan pada sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama pada tingkat komunitas (Servaes & Malikhao, 2002).

Terjadinya perubahan pada makna komunikasi menimbulkan dampak pada peran komunikasi dimana peran komunikasinya menekankan aspek kebutuhan untuk membantu pada seluruh proses pertukaran informasi yang bersifat dialogis dan interaktif. Masyarakat sendiri seharusnya mampu melakukan identifikasi kebutuhan informasi yang sesuai. Warga masyarakat di tempatkan pada posisi setara dalam mengembangkan dan memproduksi media komunikasi. Dengan adanya komunikasi partisipatif diharapkan konflik antar kelompok, komunitas dan pemangku kepentingan dapat hilang atau setidaknya menjadi berkurang.

2. Komunikasi Pemberdayaan

Kata pemberdayaan memberikan kesan tanguh, kuat, handal dalam pandangan Rappaport (1985) dalam kenyataanya konsep pemberdayaan merupakan "bahasa pertolongan" yang disampaikan dalam symbol atau lambang yang bermakna sebagai kekuatan, ketangguhan yang dapat mengubah diri sendiri, pihak lain disekitar serta warga masyarakat disekeliling kita.

Pemberdayaan menerupakan ide dasar yang menjadikan diri subjek sebagai subjek yang memiliki daya kreasi dan inovasi dalam melaksanakan pembangunan dengan mendasarkan diri pada kemandirian. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pemberdayaan memiliki dua kemungkinan yaitu:

a. Konsep yang memberikan penekanan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebahagian kekuasaan yang dimiliki, sebagian kekuatan atau kemampuan yang dipunyai kepada warga masyarakat supaya anggota masyarakat atau individu bisa berdaya. Dalam poses ini dilengkapi dengan pembangunan asset yang bersifat material untuk mendukung kemandirian warga masyarakat itu sendiri.
b. Penekanan untuk proses stimuli yang mendukung atau memotivasi agar individu atau warga masyarakat punya kemampuan atau berdaya dalam menentukan pilihan hidup melalui proses yang dialogis.

Antara kedua proses tersebut saling terkait kekuatan-kekuatan potensial yang dimiliki individu dan organisasi atau kelompok-kelompok sosial yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat mendukung penyebaran kegiatan pebangunan yang dilakukan, antara lain dalam penyebaran *difusi dan inovasi*. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini pencapain tujuan pembangunan tidak akan berhasil secara optimal

manakala suatu sistem pembangunan tidak di dukung oleh partispasi masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Komunikasi pemberdayaan merupakan proses komunikasi yang tujuannya adalah terjadinya tumbuh kembang motivasi dan kesempatan warga masyarakat memiliki saluran komunikasi sehingga warga masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Peningkatan kehidupan yang lebih baik diperoleh masyarakat melalui pemanfaatan dan penguasaan kemampuan yang masyarakat miliki sekaligus sebagai kelompok kepentimgan yang aktif. Kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat berfokus pada komunikasi pembangunan yang mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan dengan pelibatan warga masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian seluruh proses komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat memfokuskan pada komunikasi yang bersifat dialogis, interaktif dan bersifat dua arah. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai kegiatan/proyek pembangunan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki berbagai sisi kemanusiaannya, baik berupa keinginan, cita-cita, daya, nilai-nilai, budaya dan peradaban, dan sebagainya.

Konsep utama pemberdayaan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek pembangunan, masyarakat bukan semata-mata sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka warga masyarakat adalah pemilik pembangunan dan sekaligus pelaksana pembangunan itu sendiri bahkan sebagai pengawas dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada pola sebagai berikut:

(a) Pembangunan yang dilaksanakan harus focus dan terarah (targeted)
Pembangunaan harus berpihak dan ditujukan kepada pihak yang membutuhkan dan program pembangunan dirancang sebagai solusi atas masalah warga masyaraka dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhannya.
(b) Program pembangunan harus melibatkan warga masyarakat bahkan pelaksananya warga sendiri. Pelibatan warga masyarakat bertujuan agar proses bantuan berlangsung secara efektif dan efisien, juga meningkatkan warga masyarakat itu berdaya *(empowering)* baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya.
(c) Penggunaan pendekatan kelompok karena pendekatan kelompok terbukti efektif dalam pemecahan masalah, apalagi pada kelompok miskin yang memiliki tingkat pendidikan relative rendah. Apalagi kalau masalah yang dihadapi bersifat kompleks menuntut pemecahan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta pengalaman yang memadai. Pendekatan kelompok mampu menyebarkan informasi pemecahan masalah secara efektif bagi anggota kelompok. (Pranaka:2006:98)

Para ilmuwan sosial memiliki pengertian serta rumusan berbeda tentang pemberdayaan, hal ini berarti belum ada definisi yang pasti dan tegas tentang konsep pemberdayaan. Akan tetapi dalam pengertian yang luas diartikan sebagai daya kemampuan dan daya akses pada berbagai sumberdaya yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian untuk bisa memahami pengertian pemberdayaans secara menyeluruh dan mendalam perlu kiranya menelaah pendapat ilmuwan yang memiliki komitment kuat pada pemberdayaan. Menurut Kartasasmita (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah ikhtiar peningkatan harkat, martabat warga masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan serta keterbelakangan.

Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan melahirkan warga masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi sehingga potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pada dasarnya di tiap daerah memiliki potensi yang baik sehingga bila diberdayakan maka potensi itu dapat berkembang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebi baik serta melepaskan diri dari kemiskinan, ketergantungan hingga keterbelakangan.

Secara teoritis peran penting dalam pemberdayaan terletak pada masyarakat itu sendiri, hal itu terjadi karena masyarakat ditempatkan pada subjek pembangunan sekaligus juga subjek pemberdayaan itu sendiri. Karena itu sesungguhnya pemberdayaan tidak sepenuhnya tanggungjawab pemerintah. Menurut Robinson (1994) pemberdayaan merupakan proses pribadi/ individual dan sosial/masyarakat, merupakan pembebasan kemampuan pribadi, suatu kompetensi dan kreatifitas serta kebebasan dalam tindakan. Pendapat Ife (1995) menyatakan pemberdayaan dengan mengacu pada kata "*empowerment,*" artinya memberikan daya, memberikan "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne (1997) menyatakan pemberdayaan memiliki tujuan membantu *klien* memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan serta bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang sudah mendapatkan tujuan kolektif kemudian diberdayakan dengan sikap mandirinya, lebih dari itu adalah kewajiban untuk pember-

dayaan melalui usaha sendiri dan akumulasi pengetahuan, skill serta sumberdaya lainnya dalam pencapaian tujuan tanpa ketergantungan pada bantuan pertolongan pihak eksternal.

Tahapan pemberdayaan yang mampu menciptakan masyarakat dengan karakter mandiri, kreatif, inovatif perlu dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan dengan pelibatan atau partisipas masyarakat secara bertanggungjawab. Sehubungan dengan tujuan pemberdayaan Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk karakter inividu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian pikiran, tindakan, dan pengendalian terhadap apa yang dilakukannya. Kemandirian masyarakat adalah kondisi yang ditandai oleh kemampuan dalam berpikir, memutuskan serta melaksanakan tindakan yang dianggap benar dalam rangka memecahkan masalah yang warga masyaraka hadapi dengan berdasar kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan dalam konteks ini adalah kemampuan koqnitif, konatif, psikomotorik dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik atau mental. Kemampuan koqnitif adalah kemampuan berpikir yang berdasar pada pengetahuan atau wawasan yang dimiliki sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Kemampuan konatif adalah sikap yang terbentuk dari perilaku sensitive pada nilai pemberdayaan itu sendiri. Kemampuan psikomotorik adalah skil masyarakat sebagai keterampilan untuk mendukung masyarakat melakukan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kesimpulannya adalah pemberdayaan merupakan:

a) Sebagai kemampuan dasar yang dapat berperan aktif dalam pembangunan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minilam untuk kelompok masyarakat tertentu.
b) Pemberdayaan mendorong kapasitas anggota masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat itu sendiri.
c) Pemberdayaan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, yang memiliki ide, kreatifitas, pemiliki pembangunan itu sendiri.
d) Pemberdayaan bisa membawa pengaruh pada perubahan sosial yang berskala besar dan luas, skala lokal, regional hingga global.
e) Pemberdayaan mampu mengoptimalkan kemampuan warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.

Program pemberdayaan yang dilakukan dan dirancang oleh pemerintah atau lembaga swasta lain agar kelompok masyarakat sekitar bantaran kali memiliki rasa percaya diri, mandiri, juga memiliki banyak hal-hal positif yang didapatkan seperti pengetahuan, keterampilan atau skill, motivasi, juga pekerjaan.

3. Strategi Pemberdayaan

Secara teoritas strategi pemberdayaan masyarakat sekitar bantaran sungai dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Memberikan Motivasi
   Warga masyarakat bisa mengerti dan memahami nilai kebersamaan dan solidaritas, interaksi sosial serta haknya sebagai warga Negara dan juga anggota masyarakat. Pembentukan kelompok perlu didorong karena kelompok merupakan mekanisme kelembagaan yang dapat mengorganisir dan menyelenggarakan aktifitas pengembangan masyarakat di wilayah desanya, kampungnya atau sekitar bantaran sungai. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk ini selanjutnya diberikan motivasi agar berperan aktif dalam kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan kemampuan yang mereka miliki.
2) Meningkakan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan.
   Pencapaian kesadaran warga masyarakat bisa diperoleh melalui pendidikan dasar, Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, kemudian keterampilan yang bersifat vokasional dikembangkan dengan cara partisipatif. Pengetahuan yang biasanya diperoleh dari pengalaman bisa digabung dengan pengatahuan dari luar, kegiatan pelatihan yang mengkombinasikan pengatahuan yang berasal dari pengalaman dan pengetahua dari bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat bahwa sungai merupakan sumber mata pencaharian, sumber penghidupan sehingga kesadaran untuk rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab pada lingkungan sungai menjadi tumbuh kembang.
3) Manajemen Diri.
   Kelompok yang terbentuk harus mampu menetapkan dalam memilih pemimpinnya. Kepemimpinan mengarahkan dan mengatur kegiatan sendiri, menyelesaikan konflik antara anggota kelompok, memelihara hubungan yang harmonis dan sinergitas antara anggota kelompok dalam proses pencapaian tujuan bersama.

Di tahapan awal proses pendampingan dari eksternal mungkin dibutuhkan agar mereka dapat memiliki pengatahuan dan pola dalam mengembangkan sebuah kelompok yang baik, dan pada akhirnya kewenangan kelompok sepenuhnya dimiliki sehingga proses pengeturan kelompok menjadi tanggung-jawab bersama.

4) Mobilisasi sumber.
Ini adalah metode untuk menghimpun sumberdaya individual yang berkontribusi dalam mendapatkan modal sosial. Dasat pemikiran ini adalah pada dasarnya tiap orang punya kelebihan yang jika dipersatukan akan menjadi kekuatan luar biasa untuk peningkatan dan optimalisasi pemeliharaan lingkungan di sekitar bantaran sungai. Yang menjadi focus utama dalam melakukan penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumberdaya harus dilakukan secara cermat sehingga anggota masyarakat memiliki peluang yang sama.
5) Pembangunan dan pengembangan jaringan.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat sehingga memiliki kemampuan dalam membangun, mempertahankan serta mengembangkan jaringan baik antara system sosial yang ada atau dengan system sosial yang lebih luas lagi. Akses terhadap berbagai sumberdaya memberikan peluang pada kelompok warga miskin untuk menjadi berdaya.

4. Strategi Pemberdayaan Kelompok di Sekitar Bantaran Sungai.

Strategi pemberdayaan masyarakat bantaran sungai menuntut intervensi multi-dimensi yang melampaui sekadar penataan ruang fisik, berfokus pada penciptaan kemandirian komprehensif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ekosistem permukiman ini sering kali dihuni oleh keluarga rentan yang menjadi kelompok sasaran program perlindungan sosial berkelanjutan, sehingga pendekatannya harus menyentuh akar struktural dan kultural.

Filosofi Lokal	Makna Substansial	Aplikasi Konkret di Bantaran Sungai
Sabilulungan	Semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesetaraan dalam menyelesaikan masalah komunal.	Digunakan sebagai basis operasional untuk kerja bakti pengerukan sedimen, pembangunan tanggul swadaya, atau pengelolaan MCK komunal tanpa sistem komando yang kaku.
Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh	Saling menyayangi, saling mengedukasi (mencerdaskan), dan saling menjaga/membimbing.	Diterapkan dalam sistem *peer-mentoring* antarkeluarga penerima bantuan. Keluarga yang sudah mandiri secara ekonomi "mengasuh" dan "mengasah" keluarga yang masih berjuang melalui transfer keterampilan usaha.
Pamali (Tabu Ekologis)	Aturan tidak tertulis berupa larangan kultural untuk menjaga harmonisasi manusia dan alam.	Merekontruksi mitos lama (misal: *pamali miceun runtah ka walungan bisi didatangan jurig cai* / pamali buang sampah ke sungai) menjadi norma sosial baru yang ditakuti dan dipatuhi untuk mencegah pencemaran badan sungai.
Susuk Walungan	Tradisi kolektif membersihkan dan merawat aliran sungai atau saluran air menjelang musim hujan.	Diintegrasikan menjadi kalender kegiatan rutin RT/RW bantaran sungai yang didukung oleh pemerintah daerah melalui penyediaan alat berat atau insentif bagi kelompok warga yang paling konsisten.

a. Tiga Pilar Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan yang efektif harus dikalibrasi ke dalam tiga dimensi kemandirian yang saling menopang:

1) **Pemberdayaan Ekonomi (Kemandirian Material):**
Fokus pada penciptaan sumber penghidupan alternatif yang tidak merusak

ekologi sungai. Intervensi dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasis sirkuler (seperti bank sampah, daur ulang eceng gondok, atau *urban farming*). Akses terhadap permodalan mikro dan pelatihan manajemen keuangan rumah tangga diberikan agar keluarga rentan dapat menahan guncangan pendapatan harian mereka.

2) **Pemberdayaan Sosial (Kemandirian Institusional):**

Penguatan kapasitas dan kohesi jaringan komunal. Keberhasilan pilar ini sangat bergantung pada kredibilitas pendamping sosial atau fasilitator program di lapangan. Pendamping bertindak sebagai agen perubahan yang mentransformasi saluran komunikasi informal (seperti obrolan di gang sempit atau MCK) menjadi ruang deliberasi publik untuk edukasi sanitasi, mitigasi bencana, dan resolusi konflik lahan.

3) **Pemberdayaan Psikologis (Kemandirian Mental):**

Fase yang sering terlewatkan namun paling krusial. Strategi ini bertujuan merestrukturisasi *mindset* fatalisme dan ketergantungan pada bantuan eksternal menjadi *self-efficacy* (keyakinan akan kemampuan diri). Melalui konseling kelompok dan pelibatan *opinion leader* lokal, masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran kritis bahwa mereka adalah subjek pembangun lingkungan, bukan sekadar objek kebijakan atau korban bencana tahunan.

Integrasi *Local Wisdom* Jawa Barat

Membumikan strategi pemberdayaan di Jawa Barat (seperti DAS Citarum atau Ciliwung) akan jauh lebih efektif jika diinkubasi menggunakan nilai-nilai kearifan lokal Sunda sebagai instrumen komunikasi dan penggerak massa.

SIMPULAN

1. Simpulan

a. Masyarakat bantaran sungai di Jawa Barat merupakan entitas sosio-ekologis yang kompleks; masyarakat bantaran sungai tidak hanya dihadapkan pada kerentanan tata ruang dan fluktuasi ekonomi informal, tetapi juga memiliki daya resiliensi yang ditopang oleh ikatan solidaritas organik dan jaringan komunikasi interpersonal yang rapat. Permasalahan struktural di kawasan ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui relokasi fisik atau bantuan karikatif.

b. Pemberdayaan yang transformatif menuntut integrasi tiga dimensi kemandirian: ekonomi (material), sosial (institusional), dan psikologis (mental). Keberhasilan pergeseran paradigm dari masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial menuju komunitas yang berdaya dan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi ditentukan oleh seberapa baik program intervensi tersebut mengadopsi saluran komunikasi informal dan menginkubasi kearifan lokal Sunda (seperti *Sabilulungan* dan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*). Kearifan lokal ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen komunikasi strategis untuk membangun *self-efficacy* dan merekayasa perilaku pro-lingkungan.

2. Saran

a. Pendamping program perlindungan sosial di tingkat akar rumput perlu meningkatkan kapasitas komunikasi antarpribadi. Edukasi dan intervensi tidak boleh hanya mengandalkan forum formal, melainkan harus melakukan penetrasi melalui *opinion leader* lokal dan ruang-ruang interaksi kese-harian warga (seperti MCK komunal atau gang permukiman).

b. Pemerintah daerah dan aparat kewilayahan disarankan untuk secara resmi mengakui dan mendukung inisiatif kultural seperti *Susuk Walungan*, memberikan insentif bagi kelompok warga yang berhasil menjaga wilayah sungainya melalui hukum-hukum informal (*pamali*).

c. Riset ke depan dapat memetakan secara spesifik topologi jaringan komunikasi di permukiman padat untuk mengidentifikasi siapa aktor yang paling determinan dalam mengubah preferensi ekonomi dan perilaku ekologis keluarga rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W. H. Freeman. *(Referensi utama untuk menganalisis dimensi kemandirian psikologis dan efikasi diri).*

Budiman, Arief. 2010. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: P.T. Gramedia.

Depari, Eduard dan Collin McAndrew. 2011. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Dove, M. R. (2011). *The Banana Tree at the Center of the World: Environmental Resilience in the Anthropocene*. Yale University Press.

Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: P.T. Remaja Karya.

Freire, Paulo. 2014. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: P.T. Gramedia.

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.

Garna, Y. K. (2008). *Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menantang Masa Depan*. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Harun, Rochajat, H. dan Elvinaro Ardianto. 2015. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Press.

Jahi, Amri (Penyunting). 2013. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.

Jayaweera, Neville dan Sarath Anumugama. 2007. *Rethinking Development Communication*. Singapore: AMIC.

Hikmat Harry, Kusnaka Adimihardja, 2001, *Pembangunan Partisipatif*, Bandung, Rosdakarya

Ife, J. (2012). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Iskandar, J. (2012). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. ACTA Publications. *(Rujukan untuk strategi Asset-Based Community Development/ ABCD).*

Nasution, Zulkarimen. 2008. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Rogers, Everett M. (Editor). 2009. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. Penerjemah: Dasmar Nurdin. Jakarta: LP3ES.

Pelling, M. (2003). *The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience*. Earthscan.

Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Prijono, (eds.). 2006. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi,* Jakarta: CSIS.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Stra-tegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Alfabeta.

Sumardjo, J. (2015). *Sunda: Pola Rasionalitas Budaya*. Kelir.

Suryani, E. (2011). *Ragam Pesona Budaya Sunda*. Ghalia Indonesia. *(Referensi untuk filosofi Sabilulungan dan interaksi sosial masyarakat Sunda).*

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (hlm. 43–63). Kluwer Academic/Plenum Publishers.